BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2018
BENGKULU UTARA
SENIN, 30 JULI 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [X] NETRAL [ ] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Audit DD Karya Pelita,Inspektorat Diturunkan

ARGA MAKMUR – Pemkab Bengkulu Utara (BU) menurunkan Inspektorat Daerah untuk melakukan audit pada pelaksanaan Dana Desa (DD) Karya Pelita, Kecamatan Marga Sakti Sebelat Putri Hijau. Hal ini terkait pengusutan yang dilakukan Jaksa Kejaksaan Negeri BU atas laporan masyarakat.

Sekda BU, Dr. Haryadi. MM, M.Si menuturkan, sesuai perintah Bupati BU kini Inspektorat tengah melakukan audit terkait pelaksanaan DD tahun lalu tersebut. Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

"Jadi sekarang Inspektorat sudah turun. Kita melihat dulu apakah memang ada uang negara yang hilang nantinya dalam hasil audit," terangnya, kemarin (29/7).

Sesuai aturan saat ini, semua penyelesaian memang harus melalui APIP sebagai aparatur internal. Setelah itu, hasilnya nantinya akan disampaikan pada bupati untuk selanjutnya diteruskan pada desa terkait sesuai dengan hasil audit.

"Yang terkait dalam audit tersebut harus mentaati hasil audit yang dikeluarkan oleh APIP," terangnya.

Jika memang ada kerugian negara maka kepala desa atau pelaksana DD wajib mengembalikan uang dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Jika tidak dikembalikan maka hasil audit tersebut akan kembali diteruskan ke Jaksa untuk melanjutkan penyelidikan.

"Jadi itu memang sudah aturan sebagaimana mestinya. Bukan untuk menyelamatkan seseorang dalam proses hukum," katanya.

Namun ia berharap tidak ada lagi desa yang coba-coba mengun tungkan diri sendiri dalam pelaksanaan DD di desa-desa. Ia juga memastikan sudah memerintahkan pendamping Inspektorat untuk terus mengawasi jika memang ada kejanggalan dalam pelaksanaan DD di desa.

"Inspektorat selaku APIP wajib melakukan pengawasan terus menerus. Jika ada penyimpangan segera lakukan audit dan semua uang negara wajib turun ke dalam program di wilayah masing-masing," imbuh Sekda. (**)